

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan seni mencatat, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan sebagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. System pengumpulan dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dikenal dengan nama system informasi akuntansi. Dalam mewujudkan suatu system akuntansi memerlukan siklus akuntansi. Menurut Kieso (2000:64) siklus akuntansi sebagai berikut : Mengidentifikasi dan mencatat transaksi serta kejadian lainnya, pembuatan jurnal, pemindahanbukuan (*posting*), neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo yang telah disesuaikan, menyusun laporan keuangan, penutupan, neraca saldo pasca-penutupan, ayat jurnal pembalik. Daftar prosedur ini mewakili siklus akuntansi yang lengkap, yang biasanya dilakukan dalam setiap periode fiscal perusahaan.

Siklus akuntansi akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan data-data keuangan yang diperoleh dari aktivitas dan kegiatan operasional perusahaan. Menurut Indra Bastian (2006:63) Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak berkepentingan.

Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, serta kemajuan pembiayaan.

Lembaga keswadayaan masyarakat merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota lembaga keswadayaan masyarakat dan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa lembaga keswadayaan masyarakat kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank.

Sistem suatu organisasi lembaga keswadayaan masyarakat dibangun berdasarkan keputusan seluruh anggota untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kesatuan kegiatan ekonomi dapat terlihat didalam aktivitas organisasi lembaga keswadayaan masyarakat yang mencerminkan posisi anggota adalah sebagai pemilik dan sekaligus pelanggannya.

Tujuan utama Lembaga keswadayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Lembaga keswadayaan masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Karakteristik utama Lembaga keswadayaan masyarakat adalah anggota memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa Lembaga keswadayaan masyarakat. Pengelolaan dan kelangsungan Lembaga

keswadayaan masyarakat dikendalikan oleh anggota, sehingga kekuasaan tertinggi terletak pada anggota melalui rapat anggota tahunan.

Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru di provinsi Riau untuk mensinergikan PNPM Mandiri Perkotaan ditempuh dengan menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 37 Tahun 2009. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan serupa yang diterbitkan pada tahun sebelumnya. Peraturan Walikota ini secara tegas mengatur agar kegiatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota disinergikan dengan PJM Pronangkis yang telah difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Lewat peraturan ini, Pemerintah Kota juga mendorong agar peran masyarakat sebagai relawan kemiskinan semakin menonjol.

Dari sisi kuantitas, Pemerintah Kota Pekanbaru juga menargetkan mengurangi angka kemiskinan setiap tahun minimal 700 keluarga miskin, melalui peningkatan keterampilan dan penumbuhan jiwa wirausaha baru atau mengembangkan usaha bagi keluarga miskin, membangun rumah layak huni dan membangun lingkungan sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka LKM/BKM, UPS, UPL dan UPK dan KSM yang telah dibentuk oleh masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan harus dioptimalkan perannya di tengah masyarakat.

Optimalisasinya dilakukan dengan sinergi PJM Pronangkis tingkat kelurahan dengan program PENTASKIN yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pembiayaan dari APBD, CSR dan Swadaya masyarakat. Untuk

tahapan intervensi kebijakan, melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 37 Tahun 2009 ini diatur sejumlah hal:

1. Pemberian bantuan modal usaha untuk Masyarakat Tidak berdaya melalui Program Gerakan Cinta Keluarga Miskin (GENTAKIN). Bantuan Modal Usaha senilai Rp 300.000 dan Bantuan barang Senilai Rp 300.000;
2. Pemberian bantuan untuk Masyarakat Berdaya melalui PNPM Mandiri Perkotaan melalui Pemberdayaan Sosial senilai Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000 dan Pemberdayaan Ekonomi Rp 500.000 s/d Rp 2.000.000
3. Pemberian bantuan untuk Masyarakat Mandiri melalui Program Pengentasan Kemiskinan (PENTASKIN) Kota Pekanbaru dan UEK-SP dengan Pemberdayaan Sosial Rp 750.000,- dan Pemberdayaan Ekonomi Rp 2.000.000,- s/d Rp.5.000.000
4. Fasilitasi kredit untuk Masyarakat Madani melalui BPR Kota Pekanbaru dan PT.Bank Riau dengan Binaan Perbankan.

Sebagai alat pertanggungjawaban pengurus lembaga keswadayaan masyarakat, pengurus perlu menyusun laporan keuangan yang merupakan salah satu sumber informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian lembaga keswadayaan masyarakat. Laporan keuangan lembaga keswadayaan masyarakat memiliki perbedaan dengan laporan keuangan badan lain. Diantaranya adalah pada perkiraan modal terdiri dari simpanan pokok simpanan wajib, simpanan sukarela, modal penyertaan, sumbangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi, sedangkan pada badan usaha lainnya seperti CV, permodalannya merupakan milik sekutu komanditer dan

Perseroan Terbatas (PT) pemodalannya berupa saham. Pada lembaga keswadayaan masyarakat laporan laporan laba rugi disebut laporan perhitungan sisa hasil usaha dan untuk akun-akun tertentu seperti piutang, pendapatan dan kewajiban harus dibedakan antara transaksi yang terjadi dengan anggota dan non anggota.

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha-usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Laporan keuangan dengan ETAP terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2009:14)). Dalam laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi pada lembaga keswadayaan masyarakat selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota lembaga keswadayaan

masyarakat selama satu periode dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas lembaga keswadayaan masyarakat suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau akhir periode. Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang handal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo kas awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu yang disesuaikan dengan jenis lembaga keswadayaan masyarakat dan jenis usaha yang dijalankan. Laporan arus kas digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitungan sisa hasil usaha. Catatan atas laporan keuangan lembaga keswadayaan masyarakat merupakan bagian yang terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan atas

laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat antara lain perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan lembaga keswadayaan masyarakat.

PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Lembaga keswadayaan masyarakat ini bergerak pada bidang unit usaha simpan pinjam. PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru beranggotakan para masyarakat yang berada di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Proses akuntansi di PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terkhusus di bagian pengelola Unit Pelaksana Keuangan dilakukan secara manual yang dimulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti kwintansi, formulir penarikan dan penyetoran atau bukti-bukti transaksi lainnya. Kemudian dari bukti-bukti tersebut yang diterima dari bagian keuangan, transaksi tunai dicatat pada buku kas harian UPK, sedangkan transaksi yang tidak tunai dicatat pada buku pemindahbukuan. Setiap akhir bulan kas harian ini akan dihitung saldonya sehingga didapat saldo kas masuk, kas keluar, dan total saldo kas akhir serta direkap pada akhir tahun. Kemudian menyusun neraca saldo setiap bulannya yang direkap pada akhir tahun dan mencatat ke dalam buku pendapatan dan biaya hingga disajikan ke dalam laporan laba rugi dan neraca.

Pada tahun 2015 jumlah kas yang dimiliki PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah jumlah kas sebesar Rp. 177.007.548,73 (Lampiran 10) yang berasal dari Bank UPK BLM sebesar Rp. 103.188.958,73 (Lampiran 4) dan BPR Pentaskin sebesar Rp. 11.491.976,00 (Lampiran 5).

Bank merupakan simpanan uang di bank yang setiap waktu diperlukan dapat segera diambil kembali. Pada neraca terdapat akun bank pada tahun 2014 adalah Rp. 103.188.958,73,- (Lampiran 10) simpanan bank ini merupakan dana di rekening UPK PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Jumlah ini terlalu kecil apabila dibandingkan dengan jumlah kas yang ada ditangan.

Dari neraca yang disajikan PNPM Mandiri LKM Maju dapat diketahui, Pinjaman PNPM yang jumlahnya sebesar Rp83.696.475,00,- (Lampiran 10) ini merupakan dana yang dipinjamkan kepada masyarakat secara kredit, dengan pemanfaatan jangka waktu pelunasannya selama 12 bulan yang diangsur setiap bulannya.

Dari pencatatan piutang/pinjaman yang dilakukan dapat diketahui bahwa PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sudah menyajikan cadangan resiko pinjaman dengan jumlah Rp. 21.369.861,00,- (Lampiran 10) yang juga merupakan cadangan penghapusan piutang tak tertagih pada program Bantuan Langsung Masyarakat.

Pada neraca PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tahun 2015 terdapat akun berupa inventaris dan harta tetap dengan saldo Rp.0,- (Lampiran 3). Namun pihak pengelola UPK PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tidak mencatat dan menyajikannya di dalam laporan keuangan.

Pada neraca PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tahun 2014 disajikan sebesar Rp. 25.000,- (Lampiran 10) dicatat sebagai tabungan KSM karena dana ini merupakan titipan dari simpanan KSM yang merupakan hutang bagi pengelola UPK PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang sewaktu dapat diambil oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sesuai dengan kesepakatan.

Pada posisi pendapatan terdapat akun yaitu jasa/bunga pinjaman KSM sebesar Rp.10.301.475,- (Lampiran 11), dan jasa/bunga pinjaman KSM Pentaskin sebesar Rp. 375.000,- (Lampiran 11), serta pendapatan bunga Bank sebesar Rp.455.253,- (Lampiran 11) dan pendapatan bunga Bank Pentaskin sebesar Rp.137.443,- (Lampiran 11) pada beban terdapat akun insentif karyawan UPK, biaya kantor (ATK), biaya transport, biaya resiko pinjaman, dan lain-lain.

PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru belum menyajikan laporan arus kas. Lembaga keswadayaan masyarakat ini belum menyajikan Catatan Atas

Laporan Keuangan yang memuat informasi keuangan yang perlu diungkapkan, tetapi belum memuat tentang kebijakan - kebijakan akuntansi.

Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas maka penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam lagi penerapan akuntansi pada PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis mencoba mengungkapkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi pada PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana penerapan akuntansi pada PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada PNPM Lemabaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah :

- a. Bagi penulis menambah wawasan mengenai penerapan akuntansi pada PNPM Lemabaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- b. Bagi PNPM Lemabaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi lembaga keswadayaan masyarakat dalam menerapkan akuntansi perlembaga keswadayaan masyarakatan
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti dimasa yang akan datang, khususnya penerapan akuntansi perlembaga keswadayaan masyarakatan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman bagi penulis, maka penulis membagi dalam enam bab yang terperinci menjadi beberapa sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

- Bab II : Bab ini berisikan uraian teoritis mengenai gambaran umum akuntansi, gambaran umum badan usaha lembaga keswadayaan masyarakat, tujuan dan karakteristik laporan keuangan, penyajian laporan perhitungan sisa hasil usaha, penyajian laporan arus kas, penyajian , penyajian catatan atas laporan keuangan dan hipotesis.
- Bab III : Bab ini berisikan metode penelitian, yang berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.
- Bab IV : Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas yang dijalankan PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bab V : Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yakni tentang pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan dan beban, penyajian neraca, penyajian perhitungan hasil usaha, penyajian laporan arus kas, penyajian laporan promosi anggota dan penyajian catatan atas laporan keuangan.
- Bab VI : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah dilakukan.